

**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDI PERJUANGAN)
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



**PDI
PERJUANGAN**

**DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PADA HARI RABU, 2 SEPTEMBER 2026**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu,

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

MERDEKA !!!

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPRD,
para Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten
Kebumen;

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para Asisten Setda,
Para Staf Ahli Bupati Kebumen, Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Ketua
dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Bagian di lingkungan
Setda Kabupaten Kebumen, Camat se-Kabupaten Kebumen,
Pimpinan BUMD, Direktur RSDS dan Direktur RSUD Prembun;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh
jajarannya.

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak,
serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen di
manapun berada yang menangkap siaran Rapat Paripurna ini

melalui siaran Radio In FM maupun Kebumen TV yang berbahagia,

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Tidak lupa, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Akhir. Amienn....

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama **Fraksi PDI Perjuangan** DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;

Kedua, Bupati Kebumen yang telah menyampaikan Rancangan perda ini kemarin;

Ketiga, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Selanjutnya, terkait Rancangan Perda ini, **Fraksi PDI Perjuangan** menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

1. **Fraksi PDI Perjuangan** memandang bahwa capaian pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami sedikit penurunan dari semula Rp2,906 triliun menjadi Rp2,905 triliun. Pada sisi PAD, terdapat dinamika yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pajak daerah turun sebesar Rp7,42 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun sekitar Rp7,52 miliar. Di sisi lain, retribusi daerah justru meningkat

sekitar Rp15,78 miliar. Kami, berpandangan bahwa kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jangan sampai peningkatan PAD lebih banyak bertumpu pada kenaikan beban masyarakat melalui retribusi, sementara potensi pajak dan optimalisasi BUMD belum dikelola secara maksimal. Terlebih dalam dokumen terdapat piutang pendapatan yang masih cukup besar, yaitu sekitar Rp38,16 miliar setelah memperhitungkan penyelesaian/pengurangan piutang. Oleh karena itu, mohon penjelasan bagaimana strategi konkret dalam penagihan dan penyelesaian piutang dan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam mendongkrak PAD di Kabupaten Kebumen.

2. **Fraksi PDI Perjuangan** mencermati bahwa total belanja daerah meningkat cukup signifikan, dari Rp2,992 triliun menjadi Rp3,127 triliun atau bertambah sekitar Rp134,35 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari belanja operasi yang bertambah sekitar Rp77,98 miliar dan belanja modal yang bertambah sekitar Rp65,72 miliar. Kami memberikan apresiasi apabila tambahan belanja tersebut

benar-benar diarahkan untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Namun, kami juga mencermati kenaikan belanja pegawai sebesar Rp49,22 miliar sehingga menjadi Rp1,269 triliun, serta kenaikan belanja barang dan jasa sekitar Rp53,91 miliar menjadi Rp807,73 miliar. Sementara belanja bantuan sosial justru turun dari Rp6,216 miliar menjadi Rp2,358 miliar dan bantuan keuangan turun Rp23,88 miliar. Kenaikan dan penurunan belanja tersebut harus dapat dijelaskan secara transparan, baik dari sisi penyebab, kebutuhan, maupun target *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan.

3. **Fraksi PDI Perjuangan** menyoroti angka Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD turun dari Rp2,936 miliar menjadi hanya Rp510,448 juta. Artinya berkurang sekitar Rp2,426 miliar atau $\pm 82,6\%$. Apa dasar Pemerintah Daerah memangkas sekitar 82,6% anggaran rehabilitasi PAUD? Berapa PAUD yang semula akan diperbaiki dan berapa yang akhirnya batal? Apakah seluruh kebutuhan rehabilitasi PAUD memang sudah terpenuhi?. Sebaliknya,

pelayanan dan penunjang BLUD RSUD Dr. Soedirman meningkat dari sekitar Rp129 miliar menjadi Rp153,67 miliar, atau bertambah sekitar Rp24,67 miliar. Berapa peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan yang dijanjikan kepada masyarakat? Berapa target penurunan waktu tunggu pasien, peningkatan ketersediaan obat, dan peningkatan kepuasan masyarakat?, Mohon Penjelasan.

4. Kemudian yang menjadi perhatian serius adalah meningkatnya SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan. SiLPA meningkat dari Rp92,585 miliar menjadi Rp221,115 miliar atau bertambah sekitar Rp128,53 miliar. Pada saat yang sama, defisit APBD meningkat menjadi sekitar Rp221,11 miliar. **Fraksi PDI Perjuangan** memandang bahwa SiLPA dalam jumlah besar harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Apakah tingginya SiLPA disebabkan oleh efisiensi dan penghematan yang sehat, atau justru karena terdapat program/kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal? dan Mengapa ruang fiskal diperbesar melalui SiLPA untuk menambah belanja, sementara pada saat yang sama sebagian

belanja yang langsung menyentuh masyarakat justru dikurangi?. Mohon Penjelasan.

5. **Fraksi PDI Perjuangan** memandang bahwa penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus selaras dengan KUPA dan PPAS yang telah disepakati bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, untuk itu kami berharap dalam pembahasan ini agar dilakukan pencermatan kembali dalam penataan anggaran dan kami juga meminta agar monitoring dan pengawasan perlu ditingkatkan dalam pengimplementasian program prioritas Kabupaten Kebumen. Pada akhirnya: APBD yang baik bukan APBD yang habis dibelanjakan. Akan tetapi, APBD yang baik adalah APBD yang mampu menyelesaikan persoalan rakyat.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pandangan Umum **Fraksi PDI Perjuangan** terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Kepada Badan Anggaran yang nanti akan membahas Raperda ini kami ucapkan selamat bekerja, kami berpesan agar dalam pembahasannya nanti dapat lebih detail menyelami pasal per

pasal dan lampiran demi lampirannya, agar terhindar dari kekeliruan-kekeliruan angka dan kata. Kami mendorong agar pembahasan nantinya dapat segera dirampungkan agar roda pembangunan daerah dapat terus berputar. Selanjutnya, atas tutur kata dan sikap yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MERDEKA !!!

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

KETUA



BAMBANG SUTRISNO, SE

SEKRETARIS



SUGENG WIBAWA